



**PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PADA GENERASI MUDA**

Stivani Ismawira Sinambela^{1)*}, Dwi Ardiyanti¹⁾

¹⁾Universitas Potensi Utama Medan, Jl. KL Yos Sudarso, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Indonesia.

Diterima: 30 Maret 2020

Direvisi: 04 April 2020

Disetujui: 26 Mei 2020

Abstrak

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki pola integrasi ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade. Bukan hanya terintegrasi di bidang ekonomi, namun juga sosial dan politik. MEA adalah istilah yang hadir di Indonesia yang memiliki dasar yang sama dengan AEC atau ASEAN *Economic Community*. Dengan digulirkannya MEA pada penghujung 2015 lalu, merupakan titik awal bagi setiap negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, Singapore, Vietnam, dan Indonesia, dimana kesepuluh negara tersebut meleburkan batas teritori wilayahnya kedalam sebuah pasar bebas. MEA yang merupakan pasar tunggal di kawasan ASEAN adalah wujud baru bagi politik luar negeri Indonesia dalam interaksinya dengan negara-negara anggota ASEAN lain. Pentingnya pemahaman tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada generasi muda dikarenakan mereka merupakan orang yang akan terkena dampak langsung. Secara teoritis peningkatan pemahaman tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada generasi muda merupakan salah satu wujud membangun Indonesia yang lebih maju.

Kata kunci: ASEAN, generasi muda, pasar bebas, pengenalan, dan MEA.

**INCREASING UNDERSTANDING OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (MEA) IN YOUNG
GENERATION**

Abstract

Asean Economic Community (AEC) has integration pattern ion economy among ASEAN country members by forming free trade area. However, it is not only forming integration economically, but also politic and social. AEC is the technical term in Indonesia. Began from its launching in the end of 201, it is a forstep for ASEAN country members like Brunei Darussalam, The Philipines, Malaysia, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, Singapore, Vietnam, and Indonesia, in which those ten country members has melted their borders in the free trade area. AEC which becomes the single free trade area in Southeast Asia is a new form of foreign policy for Indonesia in the context of cooperation with other ASEAN country members. Thus, the important of introduction of AEC to youth is only because civilians are the people who are get direct impact of AEC. Teoritically,the introduction about AEC to youth is one of the implication for beter Indonesia in the future.

Keywords: ASEAN, youth, free trade, introduction, and MEA.

PENDAHULUAN

ASEAN yang merupakan sebuah akronim dari *Association of Souteast Asian Nations* adalah Perhimpunan Negara-negara yang Berada dikawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah

lima negara saja sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja dimana lima negara pertama adalah pendirinya. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional

* Korespondensi Penulis. E-mail: vani.sinambela@gmail.com

kewilayahan yang begitu besar, jika dijumlahkan secara keseluruhan luas wilayahnya mencapai 1,7 juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi dengan jumlah populasi yang ada didalamnya sekitar setengah milyar orang. ASEAN dibentuk dengan maksud dan tujuan kepentingan negara-negara didalamnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dll.

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima Negara Anggota, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Berdasarkan data tahun 2006, kawasan ASEAN memiliki populasi sekitar 560 juta, luas 4,5 juta kilometer persegi, produk domestik bruto hampir US \$ 1.100 miliar, dan total perdagangan sekitar US \$ 1.400 miliar. Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah: (1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan (2) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali *Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) dan target tersebut dipercepat menjadi tahun 2015 (Pratiwi, 2015). Menurut Afandi (2011) kesepakatan tersebut salah satunya adalah membentuk integrasi ekonomi kawasan dan ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi melalui pilar ASEAN *Economic Community* (AEC). Untuk menjadikan ASEAN sebagai Asosiasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subyek hukum, telah ditandatangani Piagam ASEAN pada tahun 2007. Setelah diratifikasi oleh 10

negara anggota ASEAN, Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.

Setelah melalui proses panjang, pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007, negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN. Setelah melalui proses ratifikasi di masing-masing Negara Anggota, Piagam ASEAN mulai diberlakukan sejak tanggal 15 Desember 2008. Presiden RI telah menandatangani RUU Pengesahan Piagam ASEAN menjadi UU No. 38/2008 pada tanggal 6 November 2008. Piagam ASEAN terdiri dari Preamble, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya. Piagam ASEAN mengubah ASEAN dari asosiasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki legal personality dan berdasarkan aturan-aturan yang jelas. Selain itu, Piagam juga menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi *people-oriented organization*. Piagam ASEAN mengikat negara-negara anggota dalam melaksanakan berbagai perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menurut Marsetio (2017) menyatakan ada lima pilar kebijakan maritim yang seharusnya menjadi landasan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, yakni budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Menurutnya kelima pilar itu merupakan kebijakan yang terangkum dalam program nawacita Joko Widodo dan belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Arianto (2017) juga mengemukakan bahwa Indonesia adalah pemegang *status quo* poros maritim dunia sekaligus poros geopolitik dan keamanan dunia.

Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut didasarkan pada perhatian komprehensif terhadap konstetasi hubungan antar negara di Asia serta berbagai insiatif yang ada di kawasan seperti ASEAN *Community*. Adapun berdasarkan dokumen kebijakan tersebut terdapat tujuh pilar yang menjadi kebijakan kelautan Indonesia, yaitu: Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia;

Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut; Tata kelola dan kelembagaan laut; Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; Budaya bahari; Diplomasi maritim.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peluang besar sebagai bagian dari poros maritim dunia karena letak geografisnya berada di daerah ekuator, antara dua benua, Asia dan Australia, antara dua samudera, Pasifik dan Hindia. Menurut Wahyunisa dalam Kusumawardhani & Afriansyah (2019) poros maritim dunia adalah visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan, serta bagi dunia internasional sesuai dengan kepentingan nasional. Fathun (2017), proses mengkapitalisasi potensi maritim sebagai sumberdaya nasional menjadi *marketing power* perlu di kelola dengan baik tentunya untuk kepentingan pembangunan nasional.

Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsekuensi kebijakan poros maritim adalah sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur standar tersebut. Connelly (2015) juga mengungkapkan fokus kedaulatan yang ditekankan oleh presiden Jokowi adalah isu maritim yang diangkat ketika debat politiknya bahwa fokus politik ekonomi meluasnya program infrastruktur bidang maritim untuk peningkatan aktivitas ekonomi dan pengembangan wilayah kepulauan.

Target dari pelaksanaan MEA adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing

kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Berkaca dari target tersebut, dapat dilihat bahwa MEA ini memiliki tujuan yang mulia terhadap kawasan ASEAN. Program-program yang disusun untuk mencapai target-target tersebut terdapat pada ASEAN *Economic Community Blue Print*

Pentingnya pemahaman tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada generasi muda dikarenakan mereka merupakan orang yang akan terkena dampak langsung. Secara teoritis peningkatan pemahaman tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada generasi muda merupakan salah satu wujud membangun Indonesia yang lebih maju.

Berdasarkan latar belakang akan pentingnya pemahaman tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diatas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan pemahaman tentang MEA tersebut perlu untuk dilaksanakan, untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang peran Generasi Muda di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Potensi Utama bertanggung jawab mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan. Dalam kegiatan ini dilibatkan siswa/siswi MAN 4 Muhammadiyah, Medan, tepatnya pada Jumat, 5 Juli 2018.

Kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik, yang dapat diukur dari para siswa yang menjadi peserta penyuluhan dapat memperlihatkan antusiasnya ketika penyuluhan berlangsung dan mengikuti kegiatan tanya jawab secara interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melibatkan warga sekolah yaitu para siswa/siswa MAN 4 Muhammadiyah Medan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan materi penyuluhan kepada siswa sebagai berikut:

Kerjasama Politik Keamanan ASEAN

Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti Kawasan Damai, Bebas Dan Netral (*Zone Of Peace, Freedom And Neutrality/ ZOPFAN*), Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation /TAC in Southeast Asia*), dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara (*Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ*). Selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum (ARF). Beberapa kerjasama politik dan keamanan:

- Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT*).
- Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT*).
- Pertemuan para Menteri Pertahanan (*Defence Ministers Meeting/ADMM*) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan.
- Penyelesaian sengketa Laut China Selatan.
- Kerjasama Pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia,

bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional.

- Kerjasama di bidang hukum; bidang imigrasi dan kekonsuleran; serta kelembagaan antar parlemen.

Kerjasama Ekonomi ASEAN

Kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi mencakup kerjasama-kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas di ASEAN (AFTA). Beberapa kerjasama ekonomi adalah:

- Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui Kerjasama Industri ASEAN (*ASEAN Industrial Cooperation /AICO*).
- Kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) melalui pemberlakuan Tarif Efektif Bersama (*Common Effective Preferential Tariff - CEPT*) antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN.
- Perdagangan Bebas dengan Mitra Wicara (*Free Trade Agreement/FTA*).
- Kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan.
- Kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam.
- Kerjasama di sub-sektor pertanian dan kehutanan.
- Kerjasama di sektor energi dan mineral.
- Kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah.
- Kerjasama dalam bidang pembangunan.

Kerjasama Fungsional ASEAN

Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba, peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Beberapa kerjasama fungsional adalah:

- Kerjasama kebudayaan, penerangan, dan pendidikan, yang kegiatan-kegiatannya berbentuk workshop dan simposium di bidang seni dan budaya, *ASEAN Culture Week*, *ASEAN Youth Camp*, *ASEAN Quiz*, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, pertukaran berita melalui tv, penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional, *Student Exchange Programme ASEAN*, dan pembentukan *ASEAN University Network (AUN)*.
- Kerjasama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan;
- Kerjasama kesehatan, ketenagakerjaan, serta kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup dan bencana alam;
- Kerjasama sumber daya manusia yang mencakup bidang pemajuan wanita, pemuda, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang (P4GN), pengelolaan Yayasan ASEAN, serta bidang kepegawaian dan administrasi.

Hubungan Eksternal ASEAN

Visi ASEAN 2020 menegaskan ASEAN yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN. Kerjasama antara Asia Tenggara dan Timur Laut negara telah dipercepat dengan diadakannya pertemuan puncak tahunan antara para pemimpin ASEAN, Cina, Jepang, dan Republik Korea (ROK) dalam proses ASEAN *plus Three*.

Hubungan ASEAN Plus Three terus diperluas dan diperdalam di bidang dialog dan kerjasama keamanan, kejahatan transnasional, perdagangan dan investasi, lingkungan, keuangan dan moneter, pertanian dan kehutanan, energi, pariwisata, kesehatan, tenaga kerja, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan teknologi komunikasi, kesejahteraan sosial dan pembangunan, pemuda, dan pembangunan pedesaan dan pemberantasan kemiskinan. Sekarang ini ada tiga belas pertemuan tingkat menteri di bawah kerjasama ASEAN *Plus Three*.

ASEAN terus mengembangkan hubungan kerjasama dengan Mitra Dialog, yaitu, Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korsel, Selandia Baru, Federasi Rusia, Amerika Serikat,

dan United Nations Development Programme. ASEAN juga meningkatkan kerjasama dengan Pakistan di beberapa daerah kepentingan bersama.

Konsisten dengan tekad untuk meningkatkan kerjasama dengan daerah-daerah berkembang lainnya, ASEAN mempertahankan kontak dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah, yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi, *the Gulf Cooperation Council*, *the Rio Group*, *the South Asian Association for Regional Cooperation*, *the South Pacific Forum*, dan juga melalui *Asian-African Sub-Regional Organization Conference*. Sebagian besar Negara-negara Anggota ASEAN juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Asia-Europe Meeting (ASEM)*, dan *East Asia-Latin America Forum (EALAF)*. Menurut Winarno (2014) APEC merupakan contoh globalisasi yang diarahkan oleh pemerintah karena globalisasi membutuhkan negara bangsa untuk menyesuaikan diri dengan perjanjian-perjanjian global yang mungkin bertentangan dengan kepentingan-kepentingan dalam negeri.

Konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Association of South East Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi perhimpunan bangsa-bangsa kawasan Asia Tenggara yang berdiri sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok, merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1992 negara-negara anggota ASEAN menyepakati ASEAN *Free Trade Area (AFTA)* pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-4. Melalui AFTA negara-negara ASEAN mendorong modernisasi politik dan globalisasi di antara negara-negara anggota ASEAN dengan persiapan selama 15 tahun. Kemudian pada tahun 2007 perjanjian ini mengalami perubahan akibat masuknya Cina pada tahun 2012, yang kemudian dikenal dengan ASEAN-China *Free Trade Area (ACFTA)* dengan keputusan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk menjadikan kawasan ASEAN menjadi tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak FDI (*Foreign Direct Investment*) serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN (Abdurofiq, 2014).

Pelaksanaan ACFTA dan MEA berdampak pada penurunan biaya tarif ekspor-impor menjadi 0-5 persen serta penghapusan batasan kuantitatif dan hambatan non tarif lainnya. Pembukaan perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara ini diprediksi akan mampu menstimulasi hal positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Karena secara otomatis akan menambah pendapatan negara dari ekspor dan impor. Dalam rangka untuk mencapai integrasi tersebut maka dibuatlah cetak biru MEA yang memuat empat pilar utama yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastuktur, perpajakan, dan e-commerce.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.
4. ASEAN sebagai kawasan yang berintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jaringan produksi global (ASEAN Secretariat, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa: (1) setelah diadakan penyuluhan berupa seminar dan diskusi tanya-jawab, tingkat pemahaman peserta tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) meningkat, (2) para peserta mengetahui dan memahami tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), (3) para peserta memahami pentingnya peran mereka sebagai generasi muda yang akan meneruskan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

AbduRofiq, A. (2014). Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015

Terhadap Pembangunan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(2).

- Arianto, A. (2017). Kerjasama Segitiga Maritim Dunia, Indonesia, Tiongkok, Rusia: Indonesia, Kunci Keamanan Maritim Asia Tenggara dan Dunia. *Power in International Relation*, 1(2), 188-204. <http://dx.doi.org/10.22303/pir.1.2.2017.188-203>
- Afandi, M. M. (2011). Peran dan Tantangan Asean Economic Community (AEC) Dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 8 (1), 83-87.
- ASEAN Secretariat. (2015). *ASEAN Economic community blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat
- Connelly, A. L. (2015). Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 37(1) 1–28.
- Fathun, L. M. (2017). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim di Era Jokowi Dalam Filosofi Frame Ideologis. *Power in International Relation*, 1(2), 135-152. <http://dx.doi.org/10.22303/pir.1.2.2017.135-152>
- Kusumawardhani, I., & Afriansyah, A. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim. *Kertha Patrika*, 41(3), 251-282.
- Marsetio, L. T. (2016). *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh*. Retrieved 20 April 2020 from <http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5A2.%20MAKALAH%20%20DR.%20MARSETIO.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang *Kebijakan Kelautan Indonesia*.
- Pratiwi, M. (2015). Pengaruh MEA 2015 Terhadap Integrasi Pada Sistem Perdagangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(4), 293-307.
- Winarno, Budi. 2014. Globalisasi dan Rezim Demokrasi Poliarki: Kebijakan Integrasi

Ekonomi Indonesia. *Hubungan
Internasional*, 3(1), 1-12.
<https://doi.org/10.18196/hi.2014.0041.1-12>